

Judul : Program mudik gratis, Komisi V harapkan ada sosialisasi masif
Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Program Mudik Gratis Komisi V Harapkan Ada Sosialisasi Masif

ANGGOTA Komisi V DPR Ruslan M Daud meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggencarkan sosialisasi program mudik gratis Lebaran 2026. Tujuannya agar informasi layanan tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

"Sosialisasi masif merupakan kunci agar masyarakat memahami mekanisme, jadwal, hingga persyaratan pendaftaran," kata Ruslan dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Tanpa penyebaran informasi yang luas, program ini dikhawatirkan tidak terserap optimal oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Terlebih, program mudik gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. "Negara wajib memastikan informasi sampai ke level bawah, bukan hanya beredar di ruang terbatas," ujarnya.

Diketahui, pada musim Lebaran 2026, Kemenhub kembali menyediakan armada bus gratis dengan rute meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, hingga Sumatera.

Ruslan menekankan program ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi warga di tengah lonjakan tarif angkutan saat mudik. Oleh karena itu, Kemenhub harus transparan mengenai kuota

dan teknis pendaftaran agar tidak menyulitkan calon pemudik.

"Syaratnya harus sederhana dan mudah dipahami. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mengakses karena kurang informasi," kata politikus PKB ini.

Ruslan mengingatkan Pemerintah agar tetap menjadikan standar keselamatan dan kelayakan armada sebagai prioritas utama. Sehingga masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

"Lebaran merupakan momentum sakral untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Sudah seharusnya Pemerintah memfasilitasi mudik dengan seksama," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta kementerian/lembaga penyelenggara mudik lebaran 2026 memperkuat koordinasi teknis di lapangan. Kerja sama antar pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak untuk menghindari kegagalan manajemen transportasi pada puncak arus mudik lebaran mendatang.

"Kita tidak ingin melihat adanya tumpang tindih kebijakan dalam menangani arus mudik dan balik Lebaran," kata Huda di Jakarta, Selasa (10/2/2026). ■ TIF